

SALINAN
NOMOR 13/2021

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik

- Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 26. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 38 Seri E);
 27. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 2);

28. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5, Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kota Malang Provinsi Jawa Timur 179-5/2019);
30. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 1 Nomor Register Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 56-I/2019);
31. Peraturan Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Malang.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.
8. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Malang.
9. Dinas adalah Dinas Daerah Kota Malang.
10. Badan adalah Badan Daerah Kota Malang.
11. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada:

- a. RKPD Tahun 2022; dan
- b. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Dokumen Renja Perangkat Daerah untuk masing-masing perangkat daerah tersusun berdasarkan sistematika yang terdiri atas:
 - a. pendahuluan;
 - b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
 - d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. penutup.
- (2) Isi atau materi muatan dari sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah untuk masing-masing perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Renja Dinas Kesehatan;
 - c. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - d. Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
 - e. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- f. Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana;
- g. Renja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- h. Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- i. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
- j. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. Renja Dinas Perhubungan;
- l. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- m. Renja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
- n. Renja Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata;
- o. Renja Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah;
- p. Renja Sekretariat Daerah;
- q. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- r. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- s. Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- t. Renja Badan Pendapatan Daerah;
- u. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- v. Renja Inspektorat Daerah;
- w. Renja Kecamatan Klojen;
- x. Renja Kecamatan Blimbing;
- y. Renja Kecamatan Kedungkandang;
- z. Renja Kecamatan Lowokwaru;
- aa. Renja Kecamatan Sukun; dan
- bb. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB IV
PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan apabila terjadi perubahan atas RKPD.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Pagu anggaran tiap-tiap usulan program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam Renja Perangkat Daerah merupakan pagu indikatif tiap-tiap program/kegiatan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota Malang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Malang ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 6 Agustus 2021

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

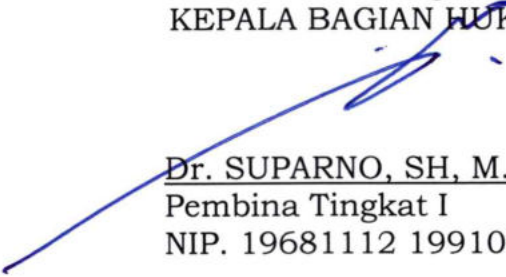
Diundangkan di Malang
pada tanggal 6 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

ERIK SETYO SANTOSO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2021 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. SUPARNO, SH, M. Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19681112 199102 1 002

LAMPIRAN XXVIII PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR TAHUN 2021 TENTANG RENCANA
KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

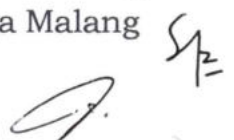
Renja Perangkat Daerah tahun 2022 memuat kerangka kebijakan, kegiatan, sasaran, uraian program kegiatan serta rencana indikatif pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang dalam mengemban visi dan misi. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Tahapan dan tata cara penyusunan Renja SKPD yaitu persiapan penyusunan Renja SKPD, penyusunan rancangan Renja SKPD, pelaksanaan forum SKPD, penetapan renja SKPD. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Malang sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Malang mempunyai kewajiban untuk menyusun perencanaan program dan kegiatan tahunan. Perencanaan tersebut dituangkan dalam berbagai dokumen tertulis salah satunya yaitu Rencana Kerja (Renja). Dokumen tersebut ditulis dengan mengacu dan berpedoman kepada landasan peraturan perundangan yang berlaku dan dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang di Kota Malang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Kota Malang.

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang ini merupakan implementasi Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang Tahun 2018-2023. Renja Tahun 2022 memuat penjabaran visi dan misi, tugas pokok dan fungsi, serta program dan kegiatan Badan Kesbangpol Kota Malang pada tahun 2022.

Rencana Kerja ini disusun berdasarkan isu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dihadapi, pemikiran dan analisis yang mendalam dan komprehensif dalam perumusan strategi, mengkaji ulang terhadap rencana kerja sebelumnya serta mempertimbangkan masukan maupun saran dari eksternal.

Untuk mewujudkan visi kota Malang yaitu Terwujudnya Kota Malang Sebagai Kota Bermartabat maka penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Malang



harus dijalankan sebaik-baiknya dengan prinsip Good Governance yang meliputi partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan efisiensi, efektifitas serta profesionalisme.

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan politik kota Malang ini menggambarkan tujuan, program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun dan dalam penyusunannya diperlukan data atau dokumen yang meliputi : kebijakan pemerintah Pusat, Kebijakan pemerintah propinsi, kebijakan pemerintah daerah, aspirasi masyarakat, perkembangan situasi global, regional maupun daerah, kinerja masa kini serta kondisi yang diinginkan dimasa yang akan datang. Sehingga diharapkan dalam penyusunan Rencana Kerja ini akan diperoleh suatu kegiatan yang partisipasif, transparan, komprehensif dan akuntabel mengingat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Malang sebagai salah satu lembaga perangkat daerah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan;
4. Peraturan Pemerintah nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJMN) 2014-2019;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 15. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018 – 2023
 18. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
 19. Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pelayanan pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 20. Peraturan Walikota Malang Nomor 62 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang.
 21. Peraturan Walikota Malang Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
 22. Peraturan Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2021 Tentang RKPD Tahun 2022

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang Tahun 2022 dimaksudkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan tahun 2022, sehingga penyelenggaraan program dan kegiatan dapat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel, sebagai bagian dari penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang Tahun 2022 adalah untuk terselenggaranya tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 dengan baik dan terkoordinasi, sesuai dengan tujuan masing-masing program dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan



Susunan garis besar isi dokumen Penyempurnaan Renja SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang dan pokok bahasan dalam penulisan Penyempurnaan Renja SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/ kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undanganyang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan
4. Lampiran tabel

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Sajikan Tabel T-C.32

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Misal:

- a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
- b. Pencapaian SDGs,
- c. Pengentasan kemiskinan,
- d. Pencapaian NSPK dan SPM,
- e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
- f. Pengembangan daerah terisolir,

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:(memindah Tabel T.C-33 tahun 2022 menjadi narasi)

- a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
- b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
- c. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumberpendanaannya.

3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan (Tabel T-C.33)

- 4.2 Tabel Pemetaan sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

BAB V : PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra

Pada bab ini, berisikan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bakesbangpol Kota Malang tahun lalu (2020), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. *Review* hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.1.1 Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Kegiatan ini anggaran tercapai sebesar 86,77% dengan terealisasi sebesar 70 OH dari target pada renstra sebesar 194 OH

2) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kegiatan ini anggaran tercapai sebesar 59,95% dengan terealisasi sebesar 69 eksemplar dari target pada renstra sebesar 98 eksemplar

b. Program Penguatan Ideologi, wawasan kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama

1) Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan

Kegiatan ini anggaran tercapai sebesar 95,34% dengan terealisasi sebesar 612 orang dari target pada renstra sebesar 1000 orang

2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil keluaran pada renstra yang direncanakan adalah

a. Program Pelayanan Kesekretariatan

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan ini anggaran tercapai sebesar 90,83% dengan terealisasi sebesar 1925 surat dari target pada renstra sebesar 2000 surat

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan ini anggaran tercapai sebesar 86,65% dengan terealisasi sebesar 12 bulan dari target pada renstra sebesar 12 bulan

3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kegiatan ini anggaran tercapai sebesar 99,02% dengan terealisasi sebesar 2050 m2 dari target pada renstra sebesar 2050 m2

4) Penyediaan Makanan dan Minuman

Kegiatan ini anggaran tercapai sebesar 93,64% dengan terealisasi sebesar 12 bulan dari target pada renstra sebesar 12 bulan

5) Pengadaan perlengkapan dan Peralatan sarana dan prasarana kantor

Kegiatan ini anggaran tercapai sebesar 93,47% dengan terealisasi sebesar 27 jenis dari target pada renstra sebesar 27 jenis

6) Peningkatan/pengembangan kapasitas sumber daya aparatur

Kegiatan ini anggaran tercapai sebesar 40% dengan terealisasi sebesar 26 orang dari target pada renstra sebesar 26 orang

7) Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

Kegiatan ini anggaran tercapai sebesar 91,83% dengan terealisasi sebesar 3 roda 4 dan 10 roda 2 dari target pada renstra sebesar 3 roda 4 dan 10 roda 2

8) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor

Kegiatan ini anggaran tercapai sebesar 81.58% dengan terealisasi sebesar 16 jenis dari target pada renstra sebesar 16 jenis

9) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Kegiatan ini anggaran tercapai sebesar 71,41% dengan terealisasi sebesar 200 m2 dari target pada renstra sebesar 200 m2

10) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kegiatan ini anggaran tercapai sebesar 97,71% dengan terealisasi sebesar 15 dokumen dari target pada renstra sebesar 15 dokumen

11) Penyusunan laporan keuangan

Kegiatan ini anggaran tercapai sebesar 94,22% dengan terealisasi sebesar 1 dokumen dari target pada renstra sebesar 1 dokumen.

b. Program Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

1) Kewaspadaan Dini di Daerah

Kegiatan ini anggaran tercapai sebesar 89,37% dengan terealisasi sebesar 170 org, 6 rekomendasi dari target pada renstra sebesar 170 org, 6 rekomendasi

2) FORKOPIMDA

Kegiatan ini anggaran tercapai sebesar 95,36% dengan terealisasi sebesar 1 kali rakor. 125 org dari target pada renstra sebesar 1 kali rakor. 125 org

3) Penanganan Gangguan Konflik Sosial

Kegiatan ini anggaran tercapai sebesar 81,47% dengan terealisasi sebesar 1800 laporan, dari target pada renstra sebesar 1800 laporan

c. Program Penguatan Ideologi, wawasan kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama

1) Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan

Kegiatan ini anggaran tercapai sebesar 95,34% dengan terealisasi sebesar 612 orang dari target pada renstra sebesar 1000 orang

2) Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama

Kegiatan ini anggaran tercapai sebesar 99,15% dengan terealisasi sebesar 48 pertemuan dari target pada renstra sebesar 55 pertemuan

3) Pembinaan Penghayat Kepercayaan

Kegiatan ini anggaran tercapai sebesar 81,81% dengan terealisasi sebesar 75 orang dari target pada renstra sebesar 75 orang

d. Program Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

1) Fasilitasi Peningkatan Peran Partai Politik dan Bantuan Keuangan Partai Politik

Kegiatan ini anggaran tercapai sebesar 91,58% dengan terealisasi sebesar 200 orang dari target pada renstra sebesar 200 orang

2) Peningkatan Kapasitas Ormas

Kegiatan ini anggaran tercapai sebesar 92,54% dengan terealisasi sebesar 70 ormas dari target pada renstra sebesar 70 ormas

2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaranyang direncanakan:

a. Program Penguatan Ideologi, wawasan kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama

1) Forum Pembauran Kebangsaan

Kegiatan ini anggaran tercapai sebesar 98,25% dengan terealisasi sebesar 150 orang dari target pada renstra sebesar 125 orang

2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan:

- a. Program Pelayanan Kesekretariatan
 - 1) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Tidak tercapainya target kegiatan tersebut disebabkan karena Refokusing
 - 2) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tidak tercapainya target kegiatan tersebut disebabkan karena Refokusing
 - b. Program Penguatan Ideologi, wawasan kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama
 - 1) Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan
Tidak tercapainya target kegiatan tersebut disebabkan karena Refokusing
- 2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah
- a. Program Pelayanan Kesekretariatan
Dengan tercapainya target program, maka kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dapat terpenuhi
 - b. Program Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
Dengan tercapainya target program, maka konflik yang berpotensi disintegrasi bangsa dapat terselesaikan
 - c. Program Penguatan Ideologi, wawasan kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama
Dengan tercapainya target program, maka penurunan kejadian yang berpotensi menyebabkan disintegrasi semakin meningkat
 - d. Program Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
Dengan tercapainya target program, maka persentase hak pilih yang digunakan dalam Pemilu semakin meningkat dan Ormas dapat lebih berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan
- 2.1.6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
- Berdasarkan penjelasan implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, maka pada tahun 2021 perlu dilakukan adalah meningkatkan kinerja kegiatan untuk mendukung capaian program.



Berikut disajikan matrik rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021.

Tabel 2.2. (TC - 29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021

Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang

Lembar :1 dari 24

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Realisasi Kinerja Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi Anggaran (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai Survey Kepuasan Internal	80		80	1,712,697,157	91.13%			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar Selama 1 tahun	2000 surat	1681 surat & 346 SRM	Surat masuk dan surat keluar = 1925 surat	126,283,600	90.83%	-		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan pembayaran belanja Telpon, Air dan Listrik	12 bulan	12 bln	12 bulan	74,468,307	86.65%	-		

XXVIII.II - 6

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Realisasi Kinerja Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi Anggaran (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Luasan Bangunan dan Lahan yang Dibersihkan	2050 m2	2050 m2	2050 m2	229,425,000	99.02%	-		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar, Jumlah Buku Peraturan	98 eksemplar	48 eksp	69 eksemplar	13,371,000	59.95%	-		
	Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah makanan dan minuman	12 bulan	12 bln	12 bulan	288,023,000	93.64%	-		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	204 OH	54 OH & 140 OH	70 OH	248,150,892	86.77%	-		
	Peringatan/Kegiatan Insidentil	jumlah pelaksanaan kegiatan insidentil	-	1 kali	-	-	-	-		

XXVIII.II - 7

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Realisasi Kinerja Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi Anggaran (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip	jumlah bahan pustaka dan dokumen arsip	-	55 eksp	-	-	-	-		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80%		80%	-	-	-		
	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	jumlah kendaraan roda 2 yg tersedia	-	4 unit	-	-	-	-		
	Pengadaan perlengkapan dan Peralatan sarana dan prasarana kantor	Jumlah peralatan yang diadakan	27 jenis	21 jenis	27 jenis	305,898,720	93.47%	-		
	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	3 roda 4 dan 10 roda 2	3 R4 dan 7 R2	3 roda 4 dan 10 roda 2	173,686,038	91.83%	-		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	16 jenis	10 jenis	17 jenis	57,902,000	81.58%	-		

XXVIII.II - 8

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Realisasi Kinerja Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi Anggaran (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah luasan gedung yg dipelihara/direhab	200 m2	Rehab pengadaan gudang	200 m2	37,470,000	71.41%	-		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah barang yang akan dinilai	-	-	-	-	-	-		
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur									
	Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah SDM	26 org	40 org	26 org	1,500,000	40.00%	-		
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%		100%	-	-	-		

XXVIII.II - 9

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Realisasi Kinerja Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi Anggaran (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan capaian	15 dok	15 dok	15 dok	76,642,600	97.71%	-		
	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan	1 dok	1 dokumen	1 dok	79,876,000	94.22%	-		
	Penyusunan/ Reviu Renstra	Jumlah dokumen renja dan jumlah dokumen renstra	-	3 dok	-	-	-	-		
	Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota	Jumlah NA dan Ranperda/Ranperwal	-	-	-	-	-	-		
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	persentase penurunan kejadian yang berpotensi menyebabkan disintegrasi	-	100%	-	-	-	-	-	-

XXVIII.II - 10

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Realisasi Kinerja Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi Anggaran (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Penguatan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama	Persentase Peningkatan Pemahaman Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	10.00%	-	10.00%	517,033,100	97.07%	-	-	-
	Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Jumlah pertemuan dalam satu tahun dan jumlah Anggota dewan penasehat	55 pertemuan	.	48 pertemuan	299,322,100	99.15%	-		
	Pembinaan Penghayat Kepercayaan	jumlah peserta pertemuan	75 orang	-	75 orang	29,749,500	81.81%	-		
	Sosialisasi penanaman nilai-nilai sejarah kebangsaan	Jumlah peserta sosialisasi	-	245 org	-	-	-	-		
	Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Jumlah peserta	1000 org	821 org	612 org	98,994,000	95.34%	-		

XXVIII.II - 11

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Realisasi Kinerja Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi Anggaran (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Fasilitasi Peningkatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	Review Perwal No 40 Tahun 2013 tentang narkoba	-	6 kegiatan	-	-	-	-		
	Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan	Jumlah forum dan jumlah kegiatan	125 org	1 forum dan 5 kegiatan	150 org	88,967,500	98.25%	-		
	Fasilitasi Gerakan Nasional Revolusi Mental	Jumlah peserta	-	100 org	-	-	-	-		
	Peningkatan Kapasitas Kader Bela Negara		-	-	-	-	-	-		
	Fasilitasi Sinergitas Pelaku Ketahanan Ekonomi		-	-	-	-	-	-		

XXVIII.II - 12

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Realisasi Kinerja Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi Anggaran (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program pendidikan politik masyarakat	persentase hak pilih yang digunakan dalam Pemilu	-	100%	-	-	-	-		
	Program Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat	52,50%		52,50%	245,579,381	92.28%			
	Pemantapan pelaksanaan rencana aksi nasional hak asasi manusia	Jumlah Kegiatan dan Jumlah Ranperwal tentang RAD HAM	-	-	-	-	-	-		
	Verifikasi bantuan keuangan parpol	Jumlah proposal parpol yang terverifikas	-	11 parpol	-	-	-	-		
	Peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu	Jumlah pelaku sosialisasi dan jumlah kegiatan	-	761 org	-	-	-	-		

XXVIII.II - 13

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Realisasi Kinerja Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi Anggaran (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Fasilitasi pendidikan politik bagi pemilih pemula	Jumlah pelaku sosialisasi dan jumlah kegiatan	-	3 kali	-	-	-	-		
	Fasilitasi Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Budaya Politik	-	-	-	-	-	-	-		
	Fasilitasi Peningkatan Peran Partai Politik dan Bantuan Keuangan Partai Politik	jumlah stakeholder yg terlibat	200 org	-	200 org	66,755,000	91.58%	-		
	Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah	-	-	-	-	-	-	-		
	Program pemberdayaan Ormas dan LSM	Persentase LSM/Ormas yang berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan definisi partisipasi aktif	-	100%	-	-	-	-	-	-

XXVIII.II - 14

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Realisasi Kinerja Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi Anggaran (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Persentase Peran Serta Ormas dalam Pembangunan	27.50%		27.50%	27.50%	#DIV/0!			
	Peningkatan kapasitas Ormas dan LSM	Jumlah Ormas yang terdata	70 ormas	70 ormas	70 ormas	178,824,381	92.54%	-		
	Pengawasan Ormas dan LSM	Jumlah kegiatan pemantauan dan jumlah ormas yang dipantau	-	30 kali	-	-	-	-		
	Program Kewaspadaan Daerah	persentase konflik yang berpotensi disintegrasi bangsa yang terselesaikan	-	100%	-	-	-	-		

XXVIII.II - 15

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Realisasi Kinerja Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi Anggaran (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Persentase Penyelesaian Kejadian Gangguan Disintegrasi Bangsa yg disebabkan konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan Keamanan	67,50%	-	67,50%	1,889,197,256	87.90%	-	-	-
	Fasilitasi FORKOPIMDA	Jumlah kegiatan koordinasi dan jumlah personil fasilitasi FORKOPIMDA	1 kali rakor. 125 org	1 kali (200 org)	1 kali rakor. 125 org	700,562,756	95.36%	-		
	Fasilitasi Kewaspadaan Dini di Daerah	Jumlah tim , Jumlah rekomendasi, Jumlah kegiatan rakor, Laporan Ipoleksosbud	170 org, 6 rekomendasi	7 tim, 3 rekom, 7 kali, 180 hari	172 org, 6 rekomendasi	415,075,600	89.37%	-		

XXVIII.II - 16

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Realisasi Kinerja Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi Anggaran (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penanganan Gangguan Konflik Sosial	Jumlah TIM, Jumlah Kegiatan	1800 laporan	6 kegiatan	1050 laporan	771,908,900	81.47%	-		
	Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah	Jumlah pemantauan	-	15 hari	-	-	-	-		
	Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing	-	-	-	-	1,650,000	64.83%	-		
JUMLAH						4,364,506,894	90.41%			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	-	-	-	-	-	100%		
		persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	-	-	-	-	-	80%		

XXVIII.II - 17

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Realisasi Kinerja Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi Anggaran (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Nilai survey kepuasan internal	-	-	-	-	-	80		
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen	-	-	-	-		15 dokumen		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra	-	-	-	-		1 dokumen		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	-	-	-	-		15 dokumen		
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN	-	-	-	-		28 Pegawai		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	-	-	-	-		28 Pegawai		

XXVIII.II - 18

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Realisasi Kinerja Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi Anggaran (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	jumlah barang milik daerah yg akan dinilai	-	-	-	-	-	50 unit		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah	-	-	-	-		50 unit		
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah peserta bimtek peraturan perundangan	-	-	-	-		28 orang		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dike mbangkan kapasitasnya	-	-	-	-		28 orang		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah surat kabar dan jumlah buku peraturan perundang - undangan	-	-	-	-		104 eksemplar		

XXVIII.II - 19

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Realisasi Kinerja Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi Anggaran (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-		104 eksemplar		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	-	-	-	-		152 OH		
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah peralatan yg diadakan	-	-	-	-		12 jenis		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor	-	-	-	-		12 jenis		
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah surat masuk dan keluar selama 1 tahun	-	-	-	-		1000 surat		

XXVIII.II - 20

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Realisasi Kinerja Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi Anggaran (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik	-	-	-	-		1000 surat		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik	-	-	-	-		12 bulan		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan	-	-	-	-		2050 m2		
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah kendaraan dinas / operasional yg dipelihara	-	-	-	-		13 unit		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	-	-	-	-		13 unit		

XXVIII.II - 21

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Realisasi Kinerja Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi Anggaran (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	-	-	-	-		19 jenis		
	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase peningkatan pemahaman ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa	-	-	-	-		11%		
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah peserta	-	-	-	-		1425 orang		
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	jumlah peserta pertemuan	-	-	-	-		900 orang		

XXVIII.II - 22

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Realisasi Kinerja Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi Anggaran (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase peningkatan partisipasi politik masyarakat	-	-	-	-		55%		
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	jumlah parpol	-	-	-	-		10 parpol		

XXVIII.II - 23

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Realisasi Kinerja Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi Anggaran (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Parpol Penerima Hibah	-	-	-	-		10 Parpol		

XXVIII.II - 24

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Realisasi Kinerja Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi Anggaran (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	jumlah pelaku sosialisasi	-	-	-	-		150 orang		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase peran serta ormas dalam pembangunan	-	-	-	-		30%		



XXVIII.II - 25

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Realisasi Kinerja Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi Anggaran (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	jumlah ormas yg terdata	-	-	-	-	-	70 ormas		
	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	jumlah ormas yg terdata	-	-	-	-	-	100 ormas		



XXVIII.II - 26

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Realisasi Kinerja Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi Anggaran (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan kondisi Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	-	-	-	-	-	70%		
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjangan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	jumlah peserta	-	-	-	-	-	1815 orang		

XXVIII.II - 27

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Realisasi Kinerja Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi Anggaran (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	jumlah peserta pertemuan, jumlah peserta rakor	-	-	-	-		1565 orang, 250 orang		
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan dan Keamanan	-	-	-	-		t		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Realisasi Kinerja Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi Anggaran (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	jumlah peserta	-	-	-	-	-	950 orang		
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-jumlah personil tim pemantau dan jumlah peserta pertemuan, '-jumlah personil Wasdin, personil FKDM, dan personil Puskomin, personil penanganan gangguan konflik di Daerah	-	-	-	-	-	100 orang, 200 orang		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok fungsi sesuai dengan urusan dimaksud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan Indikator Kinerja sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai tolok ukur yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan tugas pokok fungsi. Indikator sasaran ini dirumuskan berdasarkan:

1. analisis terhadap Indikator Kinerja dalam NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria);
2. analisis terhadap Indikator Kinerja dalam SPM;
3. analisis terhadap Indikator Kinerja Kunci sesuai PP Nomor 6 tahun 2008;
4. dan mengacu pada Lampiran T-A1 Permendagri Nomor 86 tahun 2017 aspek dan Indikator Kinerja menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan tingkat Sasaran (dampak/impact) Pemerintah Daerah;
5. isu strategis dalam penyelenggaraan tugas pokok fungsi;
6. evaluasi pelaksanaan renstra/renja tahun sebelumnya

Berdasarkan penetapan kinerja / rencana kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang memiliki 3 (tiga) indikator sasaran rencana kerja yaitu:

- a. Persentase Penyelesaian Kejadian Gangguan Disintegrasi Bangsa
- b. Persentase peningkatan partisipasi politik masyarakat dan peran serta ormas dalam pembangunan
- c. Nilai Sakip



Tabel 2.3. (TC – 30) Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bakesbangpol tidak memiliki SPM/ Standar Nasional dan IKK (Indikator Kinerja Kunci) sehingga untuk menentukan tolok ukur dan indikator kinerja yang akan di uji menggunakan indikator pada Renstra

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK (Indikator Kinerja Kunci)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Penyelesaian Kejadian Gangguan Disintegrasi Bangsa	-	-	67.5%	70%	72.5%	75%	67.5%	-			
2	Persentase Peningkatan Partisipasi politik masyarakat dan peran serta ormas dalam Pembangunan	-	-	40%	42.5%	45%	47.5%	40%	-			
5	Nilai Sakip	-	-	80.5	82.05	83.5	84.9	77.49	-			

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

- a. Kecenderungan melemahnya komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai sejarah kebangsaan dan bela negara.
- b. Peningkatan ketentraman dan ketertiban sehingga dapat mewujudkan suasana lingkungan yang terbebas dari berbagai gangguan keamanan, konflik antar golongan, dan kerusuhan yg bermotif SARA dimasyarakat.
- c. Belum maksimalnya peran serta masyarakat dalam pembangunan kehidupan politik dan organisasi kemasyarakatan, serta dalam peningkatan implementasi HAM.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program-program yang dijadikan pedoman perencanaan pembangunan dengan membandingkan antara program pembangunan dari Pemerintah Kota dengan kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat sehingga akan menghasilkan program-program prioritas untuk dijadikan rencana pembangunan kota.

Berikut adalah tabel review rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang.



Tabel 2.4. (TC – 31) *Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022*
Kota Malang

Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Malang	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	7,244,012,775	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Malang	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	7,244,012,775		
			persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80%					persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		80%	
			Nilai survey kepuasan internal	80					Nilai survey kepuasan internal		80	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Malang	jumlah dokumen	15 dokumen		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Malang	jumlah dokumen	15 dokumen			

XXVIII.II - 33

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Malang	Jumlah dokumen Renstra	1 dokumen	52,167,500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Malang	Jumlah dokumen Renstra	1 dokumen	52,167,500	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Malang	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	15 dokumen	126,346,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Malang	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	15 dokumen	126,346,000	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Malang	Jumlah ASN	28 Pegawai		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Malang	Jumlah ASN	28 Pegawai		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Malang	Jumlah ASN	28 Pegawai	4,699,562,031	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Malang	Jumlah ASN	28 Pegawai	4,699,562,031	
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Malang	jumlah barang milik daerah yg akan dinilai	50 unit		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Malang	jumlah barang milik daerah yg akan dinilai	50 unit		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Malang	Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah	50 unit	9,889,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Malang	Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah	50 unit	9,889,000	

XXVIII.II - 34

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Malang	jumlah peserta bimtek peraturan perundangan	28 orang		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Malang	jumlah peserta bimtek peraturan perundangan	28 orang		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Malang	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	28 orang	11,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Malang	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	28 orang	11,000,000	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Malang	jumlah surat kabar dan jumlah buku peraturan perundang-undangan	104 eksemplar		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Malang	jumlah surat kabar dan jumlah buku peraturan perundang-undangan	104 eksemplar		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Malang	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	104 eksemplar	73,819,900	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Malang	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	104 eksemplar	73,819,900	

XXVIII.II - 35

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Malang	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	152 OH	365,510,970	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Malang	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	152 OH	365,510,970	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Malang	jumlah peralatan yg diadakan	12 jenis		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Malang	jumlah peralatan yg diadakan	12 jenis		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Malang	Jumlah peralatan gedung kantor	12 jenis	507,208,680	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Malang	Jumlah peralatan gedung kantor	12 jenis	507,208,680	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Malang	Jumlah surat masuk dan keluar selama 1 tahun	1000 surat		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Malang	Jumlah surat masuk dan keluar selama 1 tahun	1000 surat		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Malang	Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik	1000 surat	133,525,150	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Malang	Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik	1000 surat	133,525,150	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Malang	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik	12 bulan	94,461,455	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Malang	Jumlah bulan pembayaran belanja telpon, air dan listrik	12 bulan	94,461,455	

XXVIII.II - 36

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Malang	Luasan ruangan yang dibersihkan	2050 m2	768,552,488	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Malang	Luasan ruangan yang dibersihkan	2050 m2	768,552,488	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Malang	jumlah kendaraan dinas / operasional yg dipelihara	13 unit		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Malang	jumlah kendaraan dinas / operasional yg dipelihara	13 unit		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Malang	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	13 unit	208,027,413	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Malang	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	13 unit	208,027,413	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Malang	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	19 jenis	193,942,188	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Malang	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	19 jenis	193,942,188	

No.	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM Penguatan IDEOLOGI Pancasila dan KARAKTER Kebangsaan	Kota Malang	Persentase peningkatan pemahaman ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa	11%	284,646,120	PROGRAM Penguatan IDEOLOGI Pancasila dan KARAKTER Kebangsaan	Kota Malang	Persentase peningkatan pemahaman ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa	11%	284,646,120	
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kota Malang	Jumlah peserta	1425 orang		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kota Malang	Jumlah peserta	1425 orang		
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Malang	jumlah peserta pertemuan	900 orang	284,646,120	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Malang	jumlah peserta pertemuan	900 orang	284,646,120	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kota Malang	Persentase peningkatan partisipasi politik masyarakat	55%	4,535,699,297	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kota Malang	Persentase peningkatan partisipasi politik masyarakat	55%	4,535,699,297	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kota Malang	jumlah parpol	10 parpol		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kota Malang	jumlah parpol	10 parpol		

XXVIII.II - 40

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kota Malang	Jumlah Parpol Penerima Hibah	10 Parpol	4,005,554,000	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kota Malang	Jumlah Parpol Penerima Hibah	10 Parpol	4,005,554,000	

XXVIII.II - 41

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Malang	jumlah pelaku sosialisasi	150 orang	530,145,297	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Malang	jumlah pelaku sosialisasi	150 orang	530,145,297	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kota Malang	Persentase peran serta ormas dalam pembangunan	30%	412,417,467	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kota Malang	Persentase peran serta ormas dalam pembangunan	30%	412,417,467	

XXVIII.II - 42

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kota Malang	jumlah ormas yg terdata	70 ormas		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kota Malang	jumlah ormas yg terdata	70 ormas		
	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Malang	jumlah ormas yg terdata	120 ormas	412,417,467	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Malang	jumlah ormas yg terdata	120 ormas	412,417,467	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kota Malang	Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan kondisi Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	70%	1,277,341,164	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kota Malang	Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan kondisi Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	70%	1,277,341,164	
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kota Malang	jumlah peserta	1815 orang		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kota Malang	jumlah peserta	1815 orang		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Malang	jumlah dokumen	1 dokumen	1,277,341,164	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Malang	jumlah dokumen	1 dokumen	1,277,341,164	
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kota Malang	Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan dan Keamanan	70%	2,950,999,208	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kota Malang	Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan dan Keamanan	70%	2,950,999,208	

XXVIII.II - 45

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kota Malang	jumlah peserta	950 orang		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kota Malang	jumlah peserta	950 orang		
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Malang	-jumlah personil pemantau, personil wasdin, personil FKDM, personil KPRM, personil Timdu konflik sosial, personil Forkopimda -jumlah peserta rakor, sosialisasi, pembekalan, FGD	1617 orang, 655 orang	2,950,999,208	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Malang	-jumlah personil pemantau, personil wasdin, personil FKDM, personil KPRM, personil Timdu konflik sosial, personil Forkopimda -jumlah peserta rakor, sosialisasi, pembekalan, FGD	1617 orang, 655 orang	2,950,999,208	
JUMLAH					16,705,116,031					16,705,116,031	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Melalui pelaksanaan Forum perangkat daerah diperoleh berbagai usulan terhadap kebutuhan masyarakat terhadap program pembangunan yang akan dijadikan rencana pembangunan kota. Melalui forum ini akan diketahui apa yang menjadi kebutuhan langsung masyarakat. Dari forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah dimaksud tidak ada masukan/saran program dan kegiatan baru untuk dilaksanakan oleh Bakesbangpol, karena usulan kegiatan sudah termasuk dalam kegiatan Bakesbangpol. Masukan sidang forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah hanya mempertajam indikator tujuan, sasaran dan program.

Tabel 2.5. (TC – 32)Usulan Program dan Kegiatan (Tematik) dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Kota Malang

Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang

No.	Program/ Kegiatan	Uraian	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Besaran (Rp.)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	<u>Pembinaan Pemuda:</u> IPNU harus pemberitahuan tentang organisasi IPNU Ke Bidang POLDAGRI Bakesbangpol tentang keberadaan Pemuda Demokrat di Kota Malang dan siap diperhatikan untuk dilibatkan di kegiatan Ideologi, wawasan Kebangsaan	Kota Malang	jumlah peserta	2 orang	500,000	
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	<u>Kesadaran berpolitik, bela negara:</u> Gema Keadilan harus pemberitahuan tentang organisasi Gema Keadilan ke Bidang POLDAGRI Bakesbangpol tentang keberadaan Pemuda Demokrat di Kota Malang dan siap diperhatikan untuk dilibatkan di kegiatan Ideologi, wawasan kebangsaan	Kota Malang	jumlah peserta	2 orang	500,000	
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	<u>Perlibatan IMM dalam Program dan Sinkronisasi agenda Bakesbangpol:</u> Siap diperhatikan untuk dilibatkan di kegiatan wawasan kebangsaan, cinta tanah air dan bela negara NKRI	Kota Malang	jumlah peserta	2 orang	500,000	

No.	Program/ Kegiatan	Uraian	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Besaran (Rp.)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<u>Melibatkan Generasi Muda Katolik:</u> Generasi Muda Katolik harus pemberitahuan tentang organisasi Generasi Muda Katolik ke Bidang POLDAGRI Bakesbangpol tentang keberadaan Pemuda Demokrat di Kota Malang dan siap diperhatikan untuk dilibatkan di kegiatan Ideologi, wawasan kebangsaan	Kota Malang	jumlah peserta	2 orang	500,000	
		<u>Peningkatan pemahaman organisasi:</u> Pemuda Demokrat harus pemberitahuan tentang organisasi Pemuda Demokrat ke Bidang POLDAGRI Bakesbangpol tentang keberadaan Pemuda Demokrat di Kota Malang dan siap diperhatikan untuk dilibatkan di kegiatan Ideologi, wawasan kebangsaan	Kota Malang	jumlah peserta	2 orang	500,000	
		<u>Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan:</u> Diakomodir kalau ada kegiatan pembinaan organisasi	Kota Malang	jumlah peserta	2 orang	500,000	
		<u>Jambore Pemuda:</u> Diakomodir dengan tema cinta tanah air	Kota Malang	jumlah peserta	2 orang	500,000	
		<u>Capacity Building peran pemuda dalam menangkal paham radikal:</u> diakomodir sebagai peserta	Kota Malang	jumlah peserta	2 orang	500,000	
JUMLAH					16 orang	4,000,000	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

- a) Menanamkan dan menumbuhkan kembangkan nilai-nilai Pancasila pada aparat dan seluruh masyarakat.
- b) Memfasilitasi silaturahmi dan komunikasi antar suku, etnis dan golongan serta pendidikan dan latihan tentang bela Negara
- c) Memfasilitasi pengembangan pendidikan politik bagi masyarakat
- d) Mengaktifkan seluruh komponen masyarakat untuk berperan dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat
- e) Peningkatan kemampuan dan ketrampilan bagi aparat dan potensi masyarakat.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bakesbangpol Kota Malang yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang 2018-2023. Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat daerah selama lima tahun dan dijadikan acuan dalam penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang Tahun 2022.

Dari rumusan visi dan misi RPJMD Kota Malang 2018-2023 dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang 2018-2023 tersebut, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai (target) pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Tujuan:

Tujuan Bakesbangpol Kota Malang adalah: “Meningkatkan Kondusivitas Lingkungan Sosial”

- Indikator: Persentase penyelesaian kejadian gangguan ketertiban/ konflik sosial

a. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tujuan tersebut yakni :

- i. Meningkatnya Penyelesaian Gangguan Disintegrasi Bangsa dan Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pembangunan

- Indikator :

- a. Persentase Penyelesaian Kejadian Gangguan Disintegrasi Bangsa

- b. Persentase peningkatan partisipasi politik masyarakat dan peran serta ormas dalam pembangunan

- ii. Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah

- Indikator : Nilai Sakip



2. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
 - a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah
Dalam perumusan program dan kegiatan memperhatikan pencapaian visi dan misi kepala daerah karena berkaitan dengan tujuan dan sasaran Bakesbangpol sebagai tolok ukur pencapaian sasaran
3. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - a. Jumlah program yaitu 6 program, 13 kegiatan, dan 19 sub kegiatan
 - b. Total kebutuhan dana/pagu indikatif Rp. 16,705,116,031



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 4.1. (TC – 33) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kota Malang

Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
8	0				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				16,705,116,031			18,375,627,635		
8	0	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7,244,012,775			7,968,414,053		
8	0	01	2.0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				178,513,500			196,364,850		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program /	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	Sumber		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
8 01 01 2.0 1 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	persentase dokumen perencana an, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	jumlah dokumen renstra	Nilai sakup	Kota Malang, Blimbing, Purwodadi	100 %	1 dokumen	83.5 angka	52,167,500	PENDAPA TA ASLI DAERA (PAD)	N H	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	57,384,250
8 01 01 2.0 1 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	persentase dokumen perencana an, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Nilai sakup	Kota Malang, Blimbing, Purwodadi	100 %	15 dokumen	83.5 angka	126,346,000	PENDAPA TA ASLI DAERA (PAD)	N H	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	138,980,600
8 0 1 01 2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							4,699,562,031				5,169,518,234		
8 01 01 2.0 2 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase dokumen perencana an, keuangan dan pelaporan	jumlah ASN	Nilai sakup	Kota Malang, Blimbing, Purwodadi	100 %	28 pegawai	83.5 angka	4,699,562,031	PENDAPA TA ASLI DAERA	N H	persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun	100 %	5,169,518,234

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Desa/kelurahan / Dusun	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Sumber		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
			yang disusun tepat waktu							(PAD)		tepat waktu		
8 0 01 2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					9,889,000						10,877,900	
8 01 01 2.0 3 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	jumlah dokumen laporan barang milik daerah jumlah laporan keuangan	Nilai Sakip	Kota Malang, Blimbing, Purwodadi	80 %	50 unit 1 dokumen	83.5 angka	9,889,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	NH	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80 %	10,877,900
8 0 01 2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					11,000,000						12,100,000	
8 01 01 2.0 5 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai survey kepuasan internal	jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya	Nilai Sakip	Kota Malang, Blimbing, Purwodadi	80 -	28 orang	83.5 angka	11,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	NH	Nilai survey kepuasan internal	80 -	12,100,000
8 0 01 2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah					439,330,870						483,263,957	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Desa/kelurahan / Dusun	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Sumber	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
8	01	01	2.0 6	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai survey kepuasan internal	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Nilai saki	Kota Malang, Blimbing, Purwodadi	80 -	104 eksempl	ar83.5 angka	73,819,900	PENDAPATA ASLI DAERA (PAD)	N H	Nilai survey kepuasan internal	80 -	81,201,890
8	01	01	2.0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai survey kepuasan internal	jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Nilai saki	Kota Malang, Blimbing, Purwodadi	80 -	152 OH	83.5 angka	365,510,970	PENDAPATA ASLI DAERA (PAD)	N H	Nilai survey kepuasan internal	80 -	402,062,067
8	0	01	2.0	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							507,208,680				557,929,548		
8	01	01	2.0 7	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	jumlah peraltan gedung kantor	Nilai saki	Kota Malang, Blimbing, Purwodadi	80 %	12 jenis	83.5 angka	507,208,680	PENDAPATA ASLI DAERA (PAD)	N H	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80 %	557,929,548
8	0	01	2.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							996,539,093				1,096,193,003		
8	01	01	2.0 8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai survey kepuasan internal	Jumlah surat masuk dan keluar selama 1 tahun	Nilai saki	Kota Malang, Blimbing,	80 -	1000 surat	83.5 angka	133,525,150	PENDAPATA ASLI	N H	Nilai survey kepuasan internal	80 -	146,877,665

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program /	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif	Sumber	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
									Purwodadi				DAERA (PAD)				
8	01	01	2.0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai survey kepuasan internal	bulan	Nilai sakup	Kota Malang, Blimbing, Purwodadi	80 -	12 bulan	83.5 angka	94,461,455	PENDAPA TA ASLI DAERA (PAD) N H	Nilai survey kepuasan internal	80 -	103,907,601

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Cat ata n Pen ting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Progra m	Keluaran Sub Kegiat an	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8 0 1 0 1 2. 0 8 0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai survey kepuasan internal	jumlah luasan bangunan dan lahan yg dibersihkan serta yg di jaga keamanannya	Nilai saki p	Kota Malang, Blimbing, Purwodadi	80 -	2050 m2	83.5 angka	768,552,488	PENDAPAT A ASLI DAERA (PAD)	N H	Nilai survey kepuasan internal	80 -	845,407,737
8 0 1 0 1 2. 0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						401,969,601			442,166,561				
8 0 1 0 1 2. 0 9 0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	jumlah kendaraan dinas/operasio nal yg dipelihara	Nilai saki p	Kota Malang, Blimbing, Purwodadi	80 %	13 unit	83.5 angka	208,027,413	PENDAPAT A ASLI DAERA (PAD)	N H	persentas e sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80 %	228,830,154

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
	Operasional atau Lapangan														
8	0 1 0 1 2 0 9 0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	jumlah gedung kantor yg direhabilitasi jumlah peralatan gedung kantor yg dipelihara	Nilai saki	Kota Malang, Blimbing, Purwodadi	80 %	200 m2 19 jenis	83.5 angka	193,942,188	PENDAPAT A ASLI DAERA (PAD)	N H	persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80 %	213,336,407
8	0 1 0 2	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan								284,646,120				313,110,732	
8	0 1 0 2 0 1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan								284,646,120				313,110,732	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Cat ata n Pen ting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
8 0 1 0 2 0 1 0 4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase peningkatan pemahaman ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa	jumlah peserta pertemuan	Persentase Penyelesaian Kejadian Gangguan Disintegrasi Bangsa	Kota Malang, Blimbing, Purwodadi	12 %	900 orang	72.5 %	284,646,120	PENDAPAT A ASLI DAERA (PAD)	N H	Persentase peningkatan pemahaman ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa	12 %	313,110,732
8 0 1 0 3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK								4,535,699,297			4,989,269,227		
8 0 1 0 3 1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik								4,535,699,297			4,989,269,227		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
8 0 1 3 2. 0 1 0 3	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Persentase peningkatan partisipasi politik masyarakat	jumlah parpol penerima hibah	Persentase peningkatan partisipasi politik masyarakat dan peran serta ormas dalam pembangunan	Kota Malang, Blimbing, Purwodadi	57,5 %	10 parpol	45 %	4,005,554,000	PENDAPAT A ASLI DAERA (PAD)	N H	Persentase peningkatan partisipasi politik masyarakat	57,5 %	4,406,109,400

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
8 0 0 2. 0 1 0 4	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase peningkatan partisipasi politik masyarakat	jumlah pelaku sosialisasi jumlah stakeholder yg terlibat	Persentase peningkatan partisipasi politik masyarakat dan peran serta ormas dalam pembangunan	Kota Malang, Blimbing, Purwodadi	57,5 %	150 orang 2 kali	45 %	530,145,297	PENDAPAT A ASLI DAERA (PAD)	N H	Persentase peningkatan partisipasi politik masyarakat	57,5 %	583,159,827
8	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				412,417,467						453,659,214	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	4										

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Tolok Ukur			Target	
800201	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat							412,417,467				453,659,214	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Tolok Ukur			Target		
8 0 1 4 2.0 0 1 3	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase peran serta ormas dalam pembangunan	jumlah ormas yg tersedia	Persentase peningkatan partisipasi politik masyarakat dan peran serta ormas dalam pembangunan	Kota Malang, Blimbing, Purwodadi	32,5 %	120 ormas	45 %	412,417,467	PENDAPAT A ASLI DAERA (PAD)	N H	Persentase peran serta ormas dalam pembangunan	32,5 %	453,659,214
8 0 1 5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA							1,277,341,164				1,405,075,280		
8 0 1 5 2.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya							1,277,341,164				1,405,075,280		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Tolok Ukur			Target		
8 0 1 5 2.0 1 0 4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan Keamanan	jumlah peserta pertemuan jumlah peserta rakor	Persentase Penyelesaian Kejadian Gangguan Disintegrasi Bangsa	Kota Malang, Blimbing Purwodadi	72,5 %	1565 orang 250 orang	72.5 %	1,277,341,164	PENDAPAT A ASLI DAERA (PAD)	N H	Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan Keamanan	72,5 %	1,405,075,280
8 0 1 6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				2,950,999,208				3,246,099,129					
8 0 0 2.0	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan				2,950,999,208				3,246,099,129					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Tolok Ukur			Target				
1 6 1	Konflik Sosial															
8 0 1	0 6 1	2.0 1	0 4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara,	Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan Keamanan	jumlah personil tim pemantau dan jumlah peserta pertemuan jumlah personil wasdin, personil fkd, personil puskom, personil penanganan gangguan konflik	Persentase Penyelesaian Kejadian Gangguan Disintegrasi Bangsa	Kota Malang, Blimbing, Purwodadi	72,5 %	100 orang 200 orang	72.5 %	2,950,999,208	PENDAPAT A ASLI DAERA (PAD)	N H Persentase penyelesaian kejadian gangguan disintegrasi bangsa yang disebabkan konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan Keamanan	72,5 %	3,246,099,129

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Progra m	Keluaran Sub Kegiata n	Hasil Kegiata n		Tolok Ukur		Target		
	Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaa n, serta Penanganan Konflik di Daerah													
TOTAL									16,705,116,031					18,375,627,635

BAB V
PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama tahun 2022.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang ini meliputi rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Rencana program ini pengembangannya akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat khususnya bidang politik dan keamanan di Kota Malang. Dengan demikian, rencana program ini memiliki fleksibilitas dalam pelaksanaannya dan bersifat dinamis, sepanjang proses pembangunan dilaksanakan secara efisien, tepat sasaran dan berdaya guna, serta sesuai dengan misi yang telah ditetapkan.

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian yaitu program dan kegiatan beserta indikasi anggaran yang telah ditetapkan merupakan acuan, dan apabila terdapat perubahan tidak berimplikasi dalam mewujudkan sasaran
- b. Kaidah – kaidah pelaksanaan yaitu:
 1. Renja ini merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan Bakesbangpol
 2. Bakesbangpol berkewajiban menjamin konsistensi antara Renja Perangkat Daerah dengan Renstra
 3. Keberhasilan pelaksanaan Renja Bakesbangpol sangat tergantung dari peran seluruh stakeholder yang terlibat di dalamnya
- c. Rencana tindak lanjut
Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Renja Bakesbangpol Tahun 2022, Bakesbangpol berkewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan / implementasi dokumen Renja Bakesbangpol Tahun 2022

WALIKOTA MALANG,

 SUTIAJI